



Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.
**Pedoman Kepatuhan
Anti-Korupsi/Anti-Suap**

Oktober 2020

Para direktur, pejabat, dan karyawan Babcock & Wilcox Enterprises Inc., anak perusahaan dan entitas yang dikendalikannya ("B&W" atau "Perusahaan") berkomitmen untuk mematuhi undang-undang anti-penyuapan dan anti-korupsi di semua negara dan wilayah tempat kami mengoperasikan atau memasarkan produk atau layanan. Dewan Direksi dan manajemen B&W sangat yakin dan ingin menegaskan kepada semua karyawan bahwa cara kita mencapai hasil sama pentingnya dengan hasil itu sendiri. Untuk membantu karyawan mematuhi undang-undang anti-penyuapan dan anti-korupsi serta menjalankan bisnis sesuai dengan Kode Etik Bisnis kita ("Kode") dan standar etika kita yang tinggi, B&W menyediakan Pedoman Kepatuhan Anti-Korupsi/Anti-Suap ini ("Pedoman").

Tujuan dari Pedoman ini adalah untuk memperkuat komitmen Dewan dan manajemen kami terhadap kepatuhan anti-penyuapan dan anti-korupsi dan untuk menjelaskan kewajiban karyawan, pemasok, vendor, kontraktor, agen, perwakilan, konsultan, dan mitra usaha patungan B&W yang menjalankan bisnis atas nama B&W berdasarkan Undang-Undang Praktik Korupsi Luar Negeri AS ("FCPA"), Undang-Undang Penyuapan Inggris tahun 2010 ("UKBA") dan undang-undang lain yang berlaku, dan untuk memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan yang mungkin timbul terkait masalah ini. Meskipun Pedoman ini merupakan bagian integral dari Program Etika dan Kepatuhan B&W, ini tidak dimaksudkan untuk meminimalkan pentingnya ketentuan lain dari Kode atau Program Etika dan Kepatuhan. Pedoman ini juga tidak dimaksudkan untuk mengarahkan karyawan untuk membuat penilaian hukum mengenai FCPA atau UKBA. Sebaliknya, ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang undang-undang tersebut kepada karyawan, pemasok, vendor, kontraktor, agen, perwakilan, konsultan, dan mitra usaha patungan B&W dan membuat mereka sadar akan kerumitan undang-undang tersebut, sehingga semua orang akan tahu kapan harus mencari saran dari Departemen Etika dan Kepatuhan atau Departemen Hukum. Manual ini berfungsi sebagai alat pencegahan dalam mengenali dan menghindari potensi konflik dan pelanggaran FCPA, UKBA dan undang-undang anti-penyuapan dan anti-korupsi lainnya yang berlaku di negara tempat B&W beroperasi.

Kami juga ingin mengingatkan karyawan tentang peran penting dari kontrol internal dan sistem pelaporan keuangan kami dalam pencegahan dan pendeteksian korupsi. Evaluasi pengendalian internal kami didasarkan pada Kerangka Kerja Terintegrasi Kontrol Internal Komite Organisasi Sponsor ("COSO"). Kerangka kerja COSO diperbarui pada tahun 2013, yang mengarah ke panduan lebih lanjut seputar desain dan implementasi pengendalian internal di seluruh Perusahaan termasuk, namun tidak terbatas pada, pembentukan pengendalian internal yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan seperti FCPA dan UKBA (keduanya dibahas secara lebih terperinci dalam Pedoman ini). Manual ini memberikan informasi umum tentang kontrol internal yang berkaitan dengan upaya anti-penyuapan dan anti-korupsi, seperti penyimpanan pembukuan dan catatan yang akurat, praktik hadiah dan hiburan, praktik pembayaran, dan praktik rekening bank. Setiap karyawan dan perwakilan B&W harus menyadari perlunya kontrol internal di sekitar undang-undang dan peraturan ini dan secara aktif berusaha memastikan bahwa kontrol ini dijalankan dan efektif.

FCPA

FCPA memiliki dua bagian. Bagian antisuap berurusan dengan suap kepada pejabat pemerintah asing. Bagian kedua membahas persyaratan pencatatan dan pengendalian internal. Di bawah ini adalah ringkasan singkat dari setiap bagian.

Sehubungan dengan transaksi bisnis, ketentuan antisuap FCPA melarang tindakan:

- Memberi, menawarkan, menjanjikan atau mengizinkan untuk membayar, sesuatu yang berharga,
- Kepada "pejabat pemerintah asing",
- Dengan maksud untuk memperoleh atau mempertahankan bisnis, atau
- Memperoleh keuntungan bisnis yang tidak patut.

Bagian anti-penyuapan FCPA menyatakan bahwa tindakan kriminal mencakup membayar atau menawarkan untuk membayar apa pun yang berharga, secara langsung atau tidak langsung, kepada pejabat pemerintah asing, kandidat politik, atau siapa pun yang bertindak atas nama organisasi internasional publik, untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau memperoleh keuntungan bisnis yang tidak semestinya. Untuk dikategorikan sebagai pelanggaran FCPA, sesuatu yang berharga tidak harus berpindah tangan. Tawaran, skema, atau janji untuk membayar atau memberikan sesuatu yang berharga (bahkan di masa depan) dapat merupakan pelanggaran. Meskipun diizinkan berdasarkan FCPA, kebijakan B&W secara khusus melarang pembayaran fasilitas.

Kontrol akuntansi internal FCPA dan ketentuan penyimpanan catatan mengharuskan direktur, pejabat, karyawan, perwakilan, pemegang saham, dan afiliasi B&W untuk mematuhi ketentuan FCPA yang mengharuskan tindakan untuk:

- Mempertahankan pembukuan dan catatan yang secara akurat mencerminkan setiap transaksi; dan
- Memelihara sistem pengendalian akuntansi internal.

Persyaratan untuk mencatat dengan benar semua transaksi secara adil dan akurat mencakup semua dokumen asli termasuk faktur, kuitansi, dan laporan pengeluaran dan bukan hanya buku besar umum. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mencegah perusahaan menyembunyikan suap dan untuk mencegah praktik akuntansi yang curang. Misalnya, perusahaan tidak dapat mencatat suap sebagai komisi kepada agen penjualan, biaya konsultasi, atau "biaya sukses" ketika ada informasi atau alasan yang sebenarnya untuk meyakini bahwa pembayaran atau sebagian dari pembayaran akan digunakan untuk tujuan pembayaran yang tidak semestinya kepada pejabat pemerintah. Kegagalan untuk mempertahankan sistem kontrol internal atau tindakan memalsukan pembukuan dan catatan merupakan pelanggaran pidana berdasarkan FCPA dan tidak sesuai dengan persyaratan COSO 2013 yang mengharuskan Perusahaan memastikan bahwa kontrol tersebut dijalankan dan efektif.

UKBA

UKBA melarang penyusunan pejabat pemerintah, begitu pula dengan ketentuan antisuap FCPA. Berbeda dengan FCPA, UKBA juga melarang suap komersial di sektor swasta. Selain larangan dalam FCPA, UKBA juga:

- Melarang segala bentuk suap,
- Melarang uang pelicin, dan
- Menerapkan tanggung jawab pribadi kepada Warga Negara Inggris (pidana dan perdata).

HADIAH DAN HIBURAN

Hadiah dan hiburan sering kali dianggap sebagai bentuk keramahtamahan dan merupakan hal yang biasa dalam bisnis sehari-hari di banyak negara tetapi dapat menyebabkan timbulnya korupsi dan penyuapan. Undang-undang antikorupsi dan antisuap melarang penawaran atau penyediaan *apa pun* yang bernilai, termasuk hadiah dan hiburan, kepada pihak ketiga untuk memperoleh keuntungan yang tidak patut atau dengan cara lain memengaruhi pihak ketiga tersebut secara tidak adil. Hadiah atau hiburan apa pun yang diberikan kepada pejabat pemerintah harus ditinjau dan disetujui secara hati-hati dan proaktif sesuai dengan kebijakan B&W untuk Hadiah, Hiburan, Sponsor, dan Perjalanan Resmi Pemerintah (Kebijakan Hadiah dan Hiburan) untuk menghindari pelanggaran hukum.

Demikian juga, menyediakan perjalanan dan penginapan kepada pihak ketiga dapat mengakibatkan pelanggaran dan hanya diperbolehkan jika terkait langsung dengan promosi, demonstrasi, atau penjelasan fasilitas, produk, layanan, atau pelaksanaan kontrak B&W lainnya. Semua permintaan perjalanan dan penginapan untuk pejabat pemerintah harus disetujui sebelumnya sesuai dengan Kebijakan Hadiah dan Hiburan.



B&W tidak menoleransi korupsi dalam bentuk apa pun, atau pelanggaran apa pun terhadap FCPA atau undang-undang antisuap dan antikorupsi lainnya oleh pejabat, direktur, karyawan, atau perwakilannya. Kebijakan kita, Kode dan Etika dan Program Kepatuhan membahas berbagai kewajiban substantif yang dikenakan pada B&W dan semua Unit Operasi/Pelaporannya untuk memastikan tidak hanya reputasi kita untuk transaksi yang jujur dan adil tetap utuh, tetapi bahwa kita selalu melakukan hal yang benar. Persyaratan ini juga berlaku untuk entitas yang dimiliki atau dikendalikan (dengan alasan kepemilikan saham, manajemen, atau lainnya) oleh B&W, termasuk kemitraan, usaha patungan, dan konsorsium.

PRAKTEK BISNIS B&W

B&W memiliki prosedur uji tuntas yang harus diikuti oleh semua karyawan sebelum keterlibatan "**perantara pihak ketiga**" atau "**TPI**" – agen proses, konsultan, perwakilan penjualan, pengecer, atau perwakilan pihak ketiga lainnya.

B&W bertanggung jawab atas tindakan perwakilannya, termasuk mitra usaha patungan, apabila B&W mengetahui atau seharusnya mengetahui secara wajar tindakan mereka yang melanggar hukum. Berdasarkan FCPA, petugas dan karyawan B&W dapat bertanggung jawab atas pembayaran yang dilakukan kepada pejabat asing oleh perantara pihak ketiga. Tanggung jawab dapat dikenakan tidak hanya ketika B&W mengetahui transaksi ilegal, tetapi juga ketika "menutup mata" terhadap indikasi bahwa pelanggaran mungkin telah terjadi. Dengan kata lain, jika karyawan B&W menunjukkan kebutaan yang disengaja, ketidaktahuan yang disengaja, atau pengabaian tindakan atau keadaan secara sadar, B&W dapat dianggap mengetahui transaksi tersebut. Fakta bahwa TPI tertentu mungkin tidak tunduk pada FCPA adalah tidak relevan. Karyawan B&W memiliki kewajiban untuk menanyakan keadaan yang mengindikasikan bahwa TPI mungkin telah atau akan bertindak melawan hukum.

Untuk melindungi B&W dan semua karyawannya, aturan berikut harus diikuti tanpa kecuali saat menanggapi permintaan pembayaran yang tidak pantas:

- Menolak untuk melakukan pembayaran dan menjelaskan bahwa kebijakan B&W melarang pembayaran semacam itu – ini bertentangan dengan FCPA, Kode Etik kita, kebijakan Anti-Suap dan Anti-Korupsi Global B&W (“Kebijakan AB/AC”), dan kemungkinan besar, hukum setempat;
- Jelaskan bahwa penolakan itu bersifat mutlak dan bahwa tidak pernah ada bahasa tubuh atau pemahaman implisit yang mengurangi kepatuhan terhadap kebijakan dan undang-undang anti-penyuapan dan anti-korupsi;
- Segera laporkan permintaan pembayaran yang tidak patut kepada Departemen Etika dan Kepatuhan, Departemen Hukum, atau melalui Saluran Integritas Perusahaan atau email rahasia di ethics@babcock.com;
- Jika mitra usaha patungan atau TPI terlibat, jelaskan bahwa mereka dilarang melakukan pembayaran apa pun atas nama B&W dan bahwa B&W akan mengakhiri hubungan jika pembayaran dilakukan.

Karena sifat dan cakupan operasi luar negeri B&W, kepatuhan terhadap antisuap dan antikorupsi menjadi sangat penting bagi B&W. Kepatuhan bukanlah pilihan; itu adalah persyaratan.

Dalam setiap kasus, apabila B&W memiliki 50% hak suara suatu entitas atau kurang dan sebaliknya tidak menjalankan kontrol operasional, FCPA mengharuskan B&W melakukan upaya dengan iktikad baik untuk memastikan kepatuhan entitas tersebut terhadap pembukuan dan catatan FCPA serta ketentuan kontrol akuntansi internal. Selanjutnya, B&W akan bekerja dengan entitas pengendali untuk mendukung penerapan persyaratan yang serupa dengan yang diuraikan dalam Pedoman ini.

Kebijakan kami adalah bahwa kami harus mematuhi isi dan semangat FCPA dan semua persyaratan hukum yang berlaku di Amerika Serikat, termasuk setiap negara bagian atau subdivisi politiknya, dan setiap negara asing tempat kami berbisnis, kecuali jika undang-undang AS melarang atau menghukum kepatuhan terhadap hukum asing tersebut (seperti dalam kasus hukum asing tertentu mengenai boikot Liga Arab terhadap Israel).

Penting untuk dipahami bahwa menurut ketentuan undang-undang dan peraturan yang mengatur B&W, Dewan Direksi, atau komite yang ditunjuk, memiliki kewajiban tegas, spesifik, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa B&W sepenuhnya mematuhi standar ini. Konsisten dengan itu, Komite Audit dan Keuangan Dewan Direksi telah menyatakan komitmennya untuk memastikan kepatuhan terhadap FCPA, Kode dan Etika dan Program Kepatuhan. Pedoman ini, bersama dengan Kode Etik dan Kebijakan AB/AC B&W, dimaksudkan untuk memastikan bahwa B&W memenuhi kewajiban ini.

Pelanggaran FCPA dan ketentuan hukum lainnya yang mengatur B&W membawa denda dan hukuman perdata dan pidana yang substansial termasuk; bagi pelanggar perorangan, pidana penjara dan larangan menjabat sebagai pejabat atau direktur perusahaan publik; dan bagi perusahaan, hilangnya hak istimewa ekspor dan diskualifikasi dari kontrak dengan pemerintah.

Jika, setelah memahami Pedoman ini, Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran tentang aktivitas yang sedang dipertimbangkan atau aktivitas yang telah terjadi, harap diskusikan kekhawatiran dan pertanyaan ini dengan Departemen Hukum atau Departemen Etika dan Kepatuhan. Daftar kontak Departemen Etika dan Kepatuhan terdapat di situs web internal Perusahaan di halaman Etika dan Kepatuhan. Anda juga dipersilakan untuk menghubungi Departemen Etika dan Kepatuhan di ethics@babcock.com.

Bagi mereka yang ingin tetap anonim, B&W menawarkan Jalur Integritas pihak ketiga 24 jam, 7 hari seminggu, multibahasa, dan global. Siapa pun yang melaporkan kekhawatiran dengan iktikad baik dilindungi dari pembalasan berdasarkan Kode Etik dan kebijakan Non-Pembalasan B&W, dan di sejumlah negara oleh undang-undang. Karyawan dan pihak lain diimbau untuk melaporkan kekhawatiran dengan menghubungi nomor bebas pulsa yang sesuai yang tercantum di bawah ini atau melalui pelaporan web atau email:

888-475-0003	AS dan Kanada
866-800-4525	Inggris Raya

Untuk mendapatkan informasi panggilan Saluran Integritas atau negara yang tidak tercantum di atas, tinjau tabel yang tersedia di: <https://www.babcock.com/en/about/ethics>

Ajukan laporan melalui web di: www.babcockandwilcox.ethicspoint.com

Melalui email di: ethics@babcock.com



PERTANYAAN DAN JAWABAN

Berikut ini adalah jawaban untuk beberapa pertanyaan umum lainnya tentang kewajiban kepatuhan tertentu serta FCPA

A. UU PRAKTIK KORUPSI ASING

Perilaku apa yang dilarang oleh ketentuan "penyuapan" dari FCPA ?

FCPA melarang setiap perusahaan AS atau pejabat, direktur, karyawan, agen, atau pemegang saham yang bertindak atas nama perusahaan tersebut untuk secara tidak patut menawarkan, membayar, berjanji untuk membayar, atau mengizinkan pembayaran, secara langsung atau tidak langsung melalui orang atau perusahaan lain mana pun, terkait apa pun yang berharga kepada pejabat pemerintah asing, partai politik, atau pejabat atau calon pejabat partai tersebut, untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis.

Siapa Pejabat Pemerintah Asing (Pejabat Pemerintah) menurut Undang-Undang Praktik Korupsi Asing AS (FCPA)?

Pejabat Pemerintah adalah pejabat atau pegawai pemerintah asing atau departemen, lembaga, atau perangkatnya, atau organisasi internasional publik, atau orang yang bertindak dalam kapasitas resmi untuk atau atas nama pemerintah, atau departemen, lembaga atau perangkat tersebut, atau untuk atau atas nama organisasi internasional publik mana pun termasuk, namun tidak terbatas pada, salah satu dari berikut ini, terlepas dari pangkat atau posisinya:

- Seorang pejabat atau pegawai dari departemen, badan, biro, otoritas pemerintah atau perangkat pemerintah asing lainnya, seperti perusahaan milik negara atau perusahaan yang dikendalikan;
- Seorang pejabat atau karyawan dari organisasi yang disponsori pemerintah seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Bank Dunia;
- Seseorang yang bertindak dalam kapasitas resmi untuk atau atas nama pemerintah atau departemen atau badan atau perangkat dari pemerintah asing, meskipun orang itu sebenarnya bukan pejabat atau pegawai pemerintahan;
- Seorang karyawan atau perwakilan dari suatu entitas yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah (misalnya, seorang karyawan dari utilitas milik negara) atau di dalamnya, suatu badan milik pemerintah berinvestasi.
- Anggota atau pegawai cabang legislatif atau yudikatif, petugas bea cukai, petugas pajak, atau petugas pinjaman Bank Dunia; atau
- Kandidat untuk jabatan politik, meskipun yang bersangkutan belum menjadi pejabat atau pegawai pemerintah, atau partai politik atau pejabat partai.
- Setiap karyawan atau pejabat dari badan pemerintah asing, atau orang yang memegang jabatan atau posisi berdasarkan hukum dari negara asing atau individu yang melakukan pekerjaan untuk badan pemerintah asing berdasarkan kontrak.

Siapa yang dimaksud dengan Perwakilan?

Setiap "perantara pihak ketiga" atau "TPI" yang berwenang untuk menjalankan bisnis atas nama atau mewakili B&W harus dianggap sebagai perwakilan untuk tujuan kepatuhan antisuap dan antikorupsi. Contohnya termasuk agen penjualan, perwakilan penjualan, pengecer, konsultan, agen bea cukai, agen imigrasi, dan perantara pihak ketiga lainnya. Kebijakan Program Uji Tuntas dan Persetujuan Perantara Pihak Ketiga B&W ("Kebijakan TPI") mengharuskan semua perwakilan untuk diseleksi dengan cermat sebelum dilibatkan oleh B&W, dan perwakilan diharapkan untuk mematuhi Pedoman ini dengan cara yang sama dan tingkat yang sama seperti pejabat, direktur, dan karyawan Perusahaan.

Apakah FCPA hanya mencakup suap?

Tidak, FCPA juga mencakup persyaratan mengenai pemeliharaan pembukuan dan catatan Perusahaan yang memadai, apakah ada transaksi asing atau tidak. Ketentuan pembukuan dan catatan FCPA mengharuskan B&W untuk membuat dan menyimpan pembukuan, catatan, dan akun dengan perincian yang dinilai baik untuk mencerminkan transaksi dan disposisi aset secara adil dan juga mengharuskan sistem pengendalian internal dipelihara untuk memberikan jaminan yang dinilai baik terkait kelengkapan dan akurasinya. Ketentuan suap FCPA melarang penawaran atau pembayaran uang atau sesuatu yang berharga kepada pejabat pemerintah asing, partai politik asing (atau pejabatnya), atau kandidat jabatan politik asing dengan maksud atau tujuan yang "tidak patut" untuk mendapatkan, mempertahankan, atau mengarahkan bisnis.

Apakah FCPA mencakup pejabat atau karyawan Amerika Serikat?

Tidak. Namun, ada undang-undang lain yang mengatur interaksi dengan pejabat federal dan pemerintah negara bagian AS, dan merupakan kebijakan B&W bahwa hubungannya dengan pejabat atau karyawan pemerintah AS di Amerika Serikat (dan hubungannya dengan pejabat atau karyawan pemerintah asing) harus dilakukan sedemikian rupa sehingga pengungkapan publik secara penuh atas perincian tidak akan mempermalukan atau membahayakan integritas atau reputasi Perusahaan. Kebijakan ini berlaku, tidak soal apakah dana atau aset B&W atau dana atau aset pribadi terlibat dan juga berlaku untuk kontribusi atau pembayaran tidak langsung yang dilakukan melalui pihak ketiga. Selain itu, semua karyawan harus menyadari fakta bahwa undang-undang dan peraturan AS secara khusus dan ketat mengontrol pemberian hadiah dan hiburan kepada pegawai pemerintah AS dan kepatuhan terhadap pembatasan tersebut bersifat wajib.

Apakah ada persyaratan pelaporan internal terkait hadiah dan hiburan yang diberikan oleh Perusahaan kepada pejabat dan karyawan pemerintah AS serta pejabat dan karyawan pemerintah asing?

Ya. Hadiah untuk pejabat dan pegawai pemerintah AS, walaupun ada, jarang diperbolehkan. Dalam kasus pejabat atau pegawai pemerintah asing, hadiah seperti itu mungkin diperbolehkan tergantung pada situasinya. Hadiah semacam itu memerlukan persetujuan tertulis sebelumnya sesuai dengan Kebijakan Hadiah dan Hiburan B&W.

Bisakah FCPA berlaku dalam situasi ketika B&W hanya memiliki kepentingan minoritas dalam operasi asing?

Ya, itu bisa. Tentu saja, tingkat kepemilikan dan kontrol relevan dengan "pengetahuan" dan "otorisasi". Pertanyaan yang relevan mencakup apakah B&W mengelola operasi sehari-hari atau hanya membaca laporan tahunan. Seperti disebutkan sebelumnya, warga negara AS individu yang bekerja untuk usaha asing tersebut dapat terkena tanggung jawab pribadi.

Berdasarkan FCPA, apakah Perusahaan bertanggung jawab jika perantara pihak ketiga membayar suap kepada pejabat pemerintah?

B&W dapat bertanggung jawab jika mengetahui bahwa TPI akan membayar suap, tidak menghentikannya, dan dengan demikian secara implisit mengizinkan suap tersebut. Pengetahuan yang

cukup untuk membuat B&W bertanggung jawab didefinisikan sebagai dan mencakup keyakinan bahwa pembayaran yang tidak patut "secara substansial pasti" akan terjadi, atau bahwa ada "kemungkinan besar" hal itu akan terjadi. Seseorang tidak dapat menghindari tanggung jawab dengan mengabaikannya. Jika ada "**bendera merah**" yang menimbulkan pertanyaan, lalu ada kewajiban untuk bertanya. Saat suatu agen menghadapi masalah, **tanda peringatan** umum mencakup, namun tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

- Hubungan TPI dengan entitas pemerintah atau pihak yang mengadakan kontrak:
Apakah TPI sendiri pengusaha dengan dwi-status pejabat pemerintah? Apakah TPI erat kaitannya dengan pejabat pemerintah? Apakah perusahaan TPI dimiliki sebagian oleh pejabat pemerintah atau keluarganya?
- Besarnya pembayaran ke agen:
Apakah pembayaran tersebut berlebihan dengan merujuk pada pembayaran yang dilakukan oleh B&W di tempat lain untuk layanan serupa? Apakah pembayaran tersebut berlebihan menurut kebiasaan setempat atau hukum setempat untuk layanan yang sah?
- Sifat pembayaran ke TPI:
Apakah TPI membuat komentar sehingga sejumlah uang diperlukan agar dia "mendapatkan bisnis", "membuat pengaturan yang diperlukan", dll.? Apakah ada indikasi kuat bahwa bisnis di negara itu hanya bisa diperoleh dengan menyuap pejabat?
- Layanan yang akan dilakukan oleh TPI:
Apakah sah bagi TPI untuk bertindak demikian di negara tersebut dan sehubungan dengan kontrak terkait? Apakah jasa TPI benar-benar diperlukan, atau hanya disarankan untuk menutupi pembayaran yang dilarang?
- Metode dan tata cara pembayaran ke TPI:
Apakah TPI meminta seluruh atau sebagian pembayaran dalam bentuk tunai atau instrumen pembawa? Apakah pembayaran akan dilakukan sebagian kepada orang atau perusahaan lain? Apakah pembayaran akan dilakukan di negara selain negara tempat layanan diberikan? Apakah TPI meminta dokumentasi palsu, misalnya faktur palsu atau kegagalan melaporkan pembayaran kepada otoritas fiskal negara tuan rumah?

Apakah FCPA hanya dipicu oleh hubungan TPI?

Tidak. Ketentuan suap FCPA melarang penawaran atau pembayaran apa pun yang berharga. FCPA dapat dipicu dalam situasi investasi apa pun, misalnya ketika pejabat pemerintah asing memiliki saham di sebuah perusahaan. Kebijakan B&W tidak mengizinkan adanya dana Perusahaan yang akan dibayarkan, dipinjamkan, diberikan, atau ditransfer, secara langsung atau tidak langsung, kepada pejabat pemerintah asing mana pun (atau kepada pejabat atau karyawan federal, negara bagian, atau lokal AS), atau kepada entitas mana pun tempat orang tersebut diketahui memiliki kepentingan material, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Penasihat Umum.

Bolehkah pejabat atau karyawan pemerintah asing dipertahankan sebagai konsultan?

Dengan persetujuan tertulis yang tegas dari Penasihat Umum dan Kepala Pejabat Kepatuhan, pejabat atau karyawan pemerintah asing dapat dipertahankan untuk memberikan layanan hukum, konsultasi, atau layanan lainnya. Persyaratan persetujuan tertulis yang sama dari Penasihat Umum berlaku untuk retensi pejabat dan karyawan federal, negara bagian, dan lokal AS. Dalam semua kasus, diharuskan ada kontrak tertulis yang menjelaskan sifat dan ruang lingkup layanan yang diberikan, dasar kompensasi dan penggantian biaya dan bahwa pembayaran oleh Perusahaan untuk layanan

tersebut atau penggantian biaya harus dilakukan hanya berdasarkan pernyataan yang menjelaskan, dengan perincian yang wajar, sifat layanan yang diberikan dan biaya yang dikeluarkan.

Semua kontrak yang diusulkan tersebut harus segera dilaporkan secara tertulis, termasuk perinciannya yang relevan, kepada Penasihat Umum.

Dapatkan penerapan FCPA dipicu ketika pemerintah asing memprivatisasi operasi?

Ya. Fakta bahwa perusahaan milik negara sedang melalui proses privatisasi tidak berarti bahwa individu asing yang terlibat tidak lagi berstatus sebagai pejabat pemerintah. Situasi ini sangat bergantung pada fakta dan Anda harus berkonsultasi dengan Departemen Hukum. Karena implikasi FCPA, membayar biaya direktur perwakilan asing, biaya perjalanan atau pengeluaran harian dan sejenisnya memerlukan persetujuan sesuai dengan kebijakan G&E B&W.

Apakah ketentuan antisuap FCPA hanya berlaku untuk mendapatkan kontrak baru? Apakah ada pengecualian de minimis di bawah FCPA?

Cakupan FCPA lebih dari sekadar mendapatkan kontrak baru dan tidak ada pengecualian de minimis. FCPA dapat menutupi pembayaran yang tidak pantas untuk mendapatkan keputusan pajak yang akan membuat kondisi bisnis menjadi lebih menguntungkan. Ini juga berlaku untuk mempertahankan bisnis saat ini. Misalnya, Pemerintah AS telah menuntut baik individu maupun perusahaan atas pelanggaran FCPA berdasarkan pembayaran \$20.000 kepada pejabat pemerintah asing oleh perusahaan AS yang mencoba menagih utang kepadanya.

Apa kebijakan Perusahaan mengenai pembayaran yang dipermudah atau dipercepat?

Pembayaran yang dipermudah atau dipercepat di pihak B&W, karyawan, atau perwakilannya atas nama Perusahaan, secara tegas dilarang. Pembayaran yang dipermudah atau uang pelicin tidak boleh dilakukan oleh karyawan Perusahaan, atau oleh pihak ketiga yang bertindak atas nama Perusahaan.

Jika Anda melakukan pembayaran atau mengetahui atau meyakini bahwa pihak ketiga telah melakukan pembayaran yang dapat dianggap sebagai pembayaran untuk mempermudah atau mempercepat tindakan rutin pemerintah yang non-diskresi, Anda harus segera memberi tahu Kepala Petugas Kepatuhan dan/atau Penasihat Umum dan pastikan pembayaran dicatat dan didokumentasikan dengan benar dalam pembukuan dan catatan Perusahaan. Jangan pernah mencoba untuk menyamarkan pembayaran tersebut menjadi sesuatu yang lain. Hukuman untuk menyamarkan pembayaran tersebut jauh lebih besar daripada hukuman untuk melakukan pembayaran.

Apakah FCPA mengatur situasi ketika sesuatu yang berharga dapat diberikan kepada pejabat pemerintah asing, partai politik, pejabat partai atau calon?

Menurut aturan FCPA, setiap tuduhan pelanggaran dapat ditanggapi dengan memberikan bukti bahwa pembayaran, hadiah, penawaran, atau janji apa pun yang bernilai adalah pengeluaran wajar dan apa adanya, seperti biaya perjalanan dan penginapan, yang dikeluarkan oleh atau atas nama pejabat dan berkaitan langsung dengan:

- promosi, demonstrasi, atau penjelasan tentang produk atau layanan; atau
- pelaksanaan atau kinerja kontrak dengan pemerintah asing atau lembaganya

Berdasarkan hal tersebut di atas, biaya perjalanan, penginapan, makan, dan hiburan yang wajar (tidak mewah atau berlebihan) dari pejabat pemerintah asing dapat dibayar oleh Perusahaan asalkan tujuannya berada dalam pengecualian promosi atau kontrak yang disebutkan di atas. Sebaiknya Perusahaan membayar langsung pengeluaran ini (misalnya, membayar maskapai atau hotel secara langsung) jika memungkinkan, daripada mengganti biaya individu, dan

disarankan untuk memberitahu pemerintah asing bahwa biaya tersebut akan dibayar oleh Perusahaan. Dalam semua kasus, dokumentasi yang memadai harus diserahkan dan persetujuan diperoleh sesuai dengan Kebijakan Hadiah dan Hiburan B&W.

Dalam situasi yang tidak tercakup dalam pembelaan FCPA untuk biaya promosi yang dijelaskan di atas, apa bentuk kebijakan Perusahaan mengenai hiburan bisnis dan hadiah kepada pejabat pemerintah asing?

Berdasarkan FCPA, jika ada niat yang tidak patut untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis, hadiah, atau pembayaran biaya hiburan bisnis, berapa pun nilainya, dilarang.

Hadiah uang tunai kepada pejabat asing sama sekali dilarang. Hadiah non-tunai hanya dapat diberikan kepada pejabat asing sesuai dengan Kebijakan G&E B&W.

Sehubungan dengan fasilitas sosial dan hiburan bisnis pejabat pemerintah asing, aturan kewajaran harus berlaku. Seringnya memberikan hadiah kepada pejabat yang banyak berjasa kepada Perusahaan akan sangat menyulitkan meskipun tidak ada hadiah tertentu yang secara langsung berhubungan dengan tindakan resmi tertentu. Selanjutnya, dalam SEMUA kasus (penggantian biaya perjalanan, hadiah, hiburan, dll.), harus dipastikan bahwa pengeluaran yang bersangkutan diperbolehkan baik menurut undang-undang setempat maupun peraturan dan pedoman dari badan/organisasi pemerintah pejabat tersebut dan harus sesuai dengan kebiasaan setempat yang umumnya diterima. Pengeluaran harus dicatat dengan benar dalam pembukuan dan catatan Perusahaan.

Apakah ada kebijakan perusahaan mengenai prosedur untuk melibatkan perantara pihak ketiga?

Ya. Kebijakan TPI B&W menetapkan persyaratan yang harus diikuti sebelum TPI dapat digunakan. Kebijakan TPI berisi syarat dan ketentuan yang dirancang untuk memastikan kepatuhan terhadap FCPA serta undang-undang dan peraturan lainnya yang harus disertakan dalam semua perjanjian dengan TPI.

Apakah orang-orang dengan tanggung jawab utama untuk pencairan dana Perusahaan tunduk pada kontrol khusus?

Ya, setiap pejabat Perusahaan dan seluruh karyawan Perusahaan yang menjadi penanggung jawab utama pencairan dana Perusahaan diwajibkan setiap tahun untuk menyerahkan surat sertifikasi. Setiap individu yang telah dianggap sebagai "karyawan yang ditunjuk", setiap tahun diwajibkan untuk menyerahkan surat kepada Kepala Petugas Kepatuhan yang menyatakan bahwa, untuk tahun sebelumnya sepanjang

pengetahuannya, tidak ada pelanggaran terhadap Kode Etik atau Pedoman ini, selain pelanggaran yang disebutkan, jika ada, yang sebelumnya telah dilaporkan atau yang tercantum dalam surat tersebut.

B. PERTANYAAN UMUM MENGENAI KEPATUHAN

Apa bentuk kebijakan Perusahaan dalam memelihara pembukuan dan catatan Perusahaan?

Pembukuan dan catatan Perusahaan harus secara akurat mencerminkan setiap transaksi yang dicatat di dalamnya. Tidak boleh ada entri yang salah atau menyesatkan dalam pembukuan dan catatan Perusahaan dengan alasan apa pun. Tidak ada pembayaran atas nama B&W yang akan disetujui tanpa dokumentasi pendukung yang memadai atau dilakukan dengan maksud atau pemahaman bahwa semua atau sebagian dari pembayaran tersebut akan digunakan untuk tujuan apa pun selain yang dijelaskan oleh dokumen yang mendukung pembayaran. Tidak boleh ada pengumpulan dana atau aset yang dirahasiakan atau tidak dicatat untuk tujuan apa pun. Dilarang keras menggunakan aset Perusahaan untuk tujuan yang melanggar hukum atau tidak patut.

Terkadang perwakilan pelanggan atau pemasok tidak menginginkan namanya dicatat pada akun pengeluaran. Apakah diperbolehkan membayar hiburan bagi orang tersebut dengan mengambil uang tunai dari dana tidak resmi atau dengan menulis cek untuk ditunaikan dan menggunakan uang tunai untuk membayar hiburan dan kemudian membebaskan biaya tersebut sebagai transportasi atau sejenisnya untuk menghindari pencatatan nama orang tersebut pada dokumentasi pengeluaran?

Tidak. Dilarang keras memelihara dana di luar pembukuan. Kebijakan B&W menetapkan bahwa cek yang mewakili pencairan dana Perusahaan tidak akan dibayarkan secara TUNAI. Dokumentasi yang disampaikan melalui laporan pengeluaran harus secara lengkap dan akurat mencerminkan tujuan pengeluaran yang sebenarnya. Kebijakan B&W akan dilanggar jika entri "Transportasi" digunakan untuk menutupi nama orang yang dihibur. Pembukuan dan catatan Perusahaan harus secara akurat mencerminkan setiap transaksi yang dicatat di dalamnya. Tidak boleh ada entri yang salah atau menyesatkan dalam pembukuan dan catatan Perusahaan dengan alasan apa pun.

Apa bentuk kebijakan Perusahaan dalam memelihara rekening bank?

Semua rekening bank yang dibuka dan dikelola oleh B&W harus dibuat atas nama entitas yang memiliki kepentingan dengan rekening tersebut. Persetujuan tertulis di muka untuk mengelola rekening dengan nama selain entitas yang membukanya harus diperoleh baik dari Kepala Petugas Kepatuhan B&W maupun Penasihat Umum. Dalam keadaan apa pun, bisnis Perusahaan tidak boleh ditransaksikan melalui rekening bank pribadi karyawan. Nama individu karyawan tidak boleh digunakan atau terlihat dalam buku bank Perusahaan.

Semua pembayaran tunai yang diterima harus segera dicatat dalam pembukuan dan catatan Perusahaan dan disimpan dalam rekening yang dikelola atas nama Perusahaan di bank atau lembaga lain yang disetujui oleh Kepala Petugas Kepatuhan B&W atau pejabat dengan tanggung jawab serupa dari entitas yang menerima pembayaran tersebut. Dana tidak akan disimpan oleh Perusahaan dalam bentuk mata uang yang dapat dinegosiasikan kecuali sejauh diperlukan secara wajar oleh operasi bisnis normal. Administrasi semua rekening bank B&W serta transaksi setoran dan penarikan tunai juga diatur dalam

kebijakan, prosedur, dan praktik yang ditetapkan dalam kebijakan B&W. Pengecualian apa pun di atas memerlukan persetujuan tertulis sebelumnya dari Kepala Bagian Keuangan B&W atau orang yang ditunjuk dan Penasihat Umum.

Semua penarikan atau pencairan dana Perusahaan harus dilakukan dengan cek, wesel, atau transfer. Transfer ke rekening bank bernomor (yaitu, jenis rekening bank yang tidak mengungkapkan nama pemegang rekening), dilarang kecuali disetujui oleh Kepala Bagian Keuangan B&W atau orang yang ditunjuk dan Penasihat Umum. Pembayaran kepada perwakilan asing, konsultan, atau TPI melalui transfer ke rekening bank bernomor dalam semua kasus sangat dilarang. Cek, wesel, dll., yang mewakili pencairan dana Perusahaan tidak akan dibayarkan dalam bentuk "TUNAI"; penerima pembayaran yang tercantum pada semua cek haruslah vendor atau pemasok (atau yang ditunjuk secara sah) dari penyedia barang atau jasa.

Semua penarikan atau pencairan harus didukung oleh dokumentasi yang memadai sebagaimana yang dijelaskan dan dengan persetujuan yang diperlukan. Dalam hal transfer ke rekening bank bernomor, yang telah disetujui, dokumentasi akuntansi harus secara jelas mengidentifikasi tujuan dan penerima pembayaran. Semua rekening bank harus dicatat dalam pembukuan dan pencatatan. Semua rekening bank akan direkonsiliasi setiap bulan di bawah arahan Kepala Bagian Keuangan B&W atau orang yang ditunjuk.

Apakah Perusahaan memiliki prosedur untuk memastikan penagihan yang akurat kepada pelanggan?

Ya. Semua penjualan barang atau jasa oleh B&W akan ditagih tepat waktu sesuai dengan ketentuan kontrak dengan pelanggan. Faktur yang dikirim ke pelanggan harus menjelaskan, dengan perincian yang dinilai baik, barang atau jasa yang disediakan dan jumlah terutang yang benar kepada Perusahaan. Setiap jumlah tertagih yang harus dikembalikan harus diidentifikasi pada faktur.

Apakah Perusahaan memiliki prosedur untuk melindungi diri dari tagihan palsu ke Perusahaan?

Ya. Setiap pembayaran barang dan jasa yang dilakukan oleh Perusahaan harus didukung dengan dokumentasi yang mencerminkan tujuan pembayaran tersebut. Semua pembayaran biaya kepada konsultan, pengacara, agen, perwakilan dan perantara pihak ketiga lainnya harus dilakukan dengan cek, wesel, atau transfer yang ditarik atas perintah pihak yang berhak.

Apa bentuk kebijakan Perusahaan mengenai karyawan Perusahaan yang menerima hadiah, pembayaran, dan hiburan?

Kecuali untuk keramahtamahan umum yang dijelaskan selanjutnya, petugas atau karyawan B&W tidak boleh mencari atau menerima hadiah pribadi, pembayaran, biaya, layanan, hak istimewa yang berharga, liburan, atau perjalanan tanpa tujuan bisnis, pinjaman (selain pinjaman konvensional dari lembaga pemberi pinjaman), atau bantuan lain dari orang atau organisasi bisnis yang melakukan atau berusaha melakukan bisnis, atau merupakan pesaing, Perusahaan. Tidak pernah diperbolehkan untuk menerima hadiah dalam bentuk tunai atau setara uang tunai (misalnya, kartu hadiah, saham, atau bentuk surat berharga lainnya) dalam jumlah berapa pun. Karyawan tidak boleh menerima sesuatu yang berharga sebagai imbalan atas

rujukan pihak ketiga kepada orang atau organisasi bisnis tersebut. Karyawan yang ditunjuk diwajibkan untuk menyatakan kepatuhan terhadap Kebijakan Hadiah dan Hiburan B&W setiap tahun.

Perusahaan bersikap sangat tegas terkait hadiah, layanan, atau pertimbangan dalam bentuk apa pun dari pemasok. Hiburan yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan di pihak pemasok harus dibatasi pada penerimaan keramahan umum yang biasanya terkait dengan praktik bisnis yang diterima oleh karyawan dan anggota keluarganya.

Di negara-negara tertentu, penolakan hadiah pribadi dengan nilai yang melebihi praktik bisnis AS yang diterima dapat membuat situasi bisnis menjadi tidak nyaman. Kelayakan karyawan untuk menyimpan hadiah berharga tersebut untuk penggunaan pribadi alih-alih menyerahkannya kepada Perusahaan harus dinilai sesuai dengan Kebijakan Hadiah dan Hiburan.

Apakah kebijakan Perusahaan melarang semua pemberian hadiah atau uang kepada perwakilan pelanggan atau pemasok pribadi?

Kebijakan Perusahaan melarang pembayaran apa pun yang bernilai, yaitu uang, tunai, cek, atau lainnya, kepada perwakilan pelanggan atau pemasok untuk memperoleh manfaat apa pun. Pemberian hadiah musiman atau hadiah barang promosi kepada, atau penyediaan jamuan atau hiburan bisnis yang wajar bagi pejabat, karyawan, atau perwakilan dari pelanggan atau pemasok pribadi mana pun diizinkan jika diberikan sesuai dengan Kebijakan Hadiah dan Hiburan dan pengeluaran untuk hadiah, bantuan, jamuan makan atau hiburan tersebut didokumentasikan secara akurat.

Tidak ada definisi yang pasti mengenai hadiah, bantuan, jamuan makan, atau hiburan seperti apa yang dapat diterima untuk setiap kejadian dan karyawan harus menggunakan penilaian yang baik dalam semua kasus. Pertanyaan dapat ditujukan ke Departemen Hukum atau Departemen Etika dan Kepatuhan. Setiap karyawan yang diminta untuk mengatur, atau dengan cara apa pun berpartisipasi dalam, pembayaran dana Perusahaan, atau apa pun yang berharga kepada pejabat, karyawan, atau perwakilan pelanggan atau pemasok mana pun harus segera meminta nasihat dari Departemen Hukum atau Departemen Etika dan Kepatuhan.

Kebijakan B&W mengharuskan setiap karyawan melaporkan setiap biaya hiburan bisnis dan hadiah musiman atau hadiah barang promosi dan nilainya yang diberikan kepada petugas, karyawan, atau perwakilan pelanggan atau pemasok mana pun yang melebihi batas yang ditetapkan dalam Kebijakan Hadiah dan Hiburan.

Apa bentuk kebijakan Perusahaan tentang kontribusi politik?

Berdasarkan kebijakan Perusahaan, baik dana Perusahaan, maupun nama Perusahaan, tidak boleh digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk tujuan politik atas nama calon pejabat politik, partai politik, atau pemegang jabatan terpilih di federal, negara bagian, atau tingkat lokal kecuali diizinkan oleh hukum yang berlaku dan harus disetujui dan dilaporkan sesuai dengan kebijakan Kontribusi Perusahaan. Pembatasan ini mencakup praktik-praktik seperti pembelian tiket makan malam politik atau acara penggalangan dana dengan dana Perusahaan dan penyediaan transportasi untuk kandidat atau partai politik. Selain itu, baik dana Perusahaan, maupun nama Perusahaan, tidak boleh digunakan dalam kaitannya dengan acara untuk menghormati pejabat pemerintah (yaitu, makan malam, turnamen golf, diskusi panel, dll.), kecuali jika diizinkan menurut hukum yang berlaku dan sesuai dengan kebijakan Kontribusi Perusahaan.

Apa bentuk kebijakan Perusahaan tentang penerimaan permintaan kontribusi politik?

Penasihat Umum harus segera diberi tahu secara tertulis tentang setiap permintaan yang sedang dipertimbangkan dalam hal kontribusi dana Perusahaan, atau pemberian hiburan, hadiah, gratifikasi, atau apa pun yang berharga melalui penggunaan dana, layanan, atau fasilitas Perusahaan sehubungan dengan kampanye politik atau aktivitas politik apa pun.

Apa bentuk kebijakan Perusahaan tentang karyawan yang berpartisipasi dalam kegiatan politiknya sendiri?

Karyawan B&W dapat secara bebas terlibat dalam aktivitas politik menurut kapasitas individu mereka, dengan ketentuan bahwa, sehubungan dengan aktivitas politik individu tersebut, fasilitas, personel, dana, nama Perusahaan, atau referensi apa pun yang dipegang oleh individu tersebut pada B&W tidak boleh digunakan, kecuali sebagaimana diwajibkan menurut undang-undang federal, negara bagian, atau lokal terkait pengungkapan kontribusi politik individu. Karyawan yang memberikan kontribusi politik harus melakukannya dengan uang mereka sendiri tanpa berpikir untuk mendapatkan penggantian dari Perusahaan atau keuntungan atau bantuan apa pun untuk Perusahaan.

Bagaimana dengan penggunaan dana Perusahaan sehubungan dengan proposisi yang diajukan kepada pemilih atau pada undang-undang?

B&W dapat menggunakan dana, fasilitas, dan personelnnya untuk mendukung, menentang, atau mengambil sikap umum sehubungan dengan proposisi yang diajukan untuk persetujuan publik, masalah nonpartisan lainnya, atau undang-undang yang memengaruhi Perusahaan, karyawan, atau pemegang sahamnya. Semua penggunaan tersebut harus mendapat persetujuan tertulis sebelumnya sesuai dengan kebijakan Kontribusi Perusahaan.

Apakah Perusahaan diperbolehkan untuk memberikan penggantian biaya kepada karyawan atas kontribusi politik yang dilakukan oleh karyawan tersebut?

Kampanye federal dilarang menerima kontribusi dari Perusahaan, dan merupakan pelanggaran terhadap kebijakan B&W untuk menggunakan dana atau aset Perusahaan apa pun untuk kontribusi politik federal. Oleh karenanya, Perusahaan tidak akan mengganti uang kontribusi karyawan untuk kampanye politik federal yang dibuat oleh karyawan tersebut. Boleh atau tidaknya dana Perusahaan dapat digunakan untuk pemilihan negara bagian atau lokal, dan boleh tidaknya dana tersebut dapat digunakan untuk mengganti kontribusi yang dibuat oleh orang lain, bergantung pada hukum setempat dan semua pertanyaan tersebut harus dirujuk ke Penasihat Umum.

Bolehkah dana Perusahaan digunakan untuk kontribusi politik luar negeri?

Jawabannya tergantung pada hukum asing dan FCPA dan semua pertanyaan tersebut harus dirujuk ke Penasihat Umum. Setiap kontribusi tersebut memerlukan persetujuan tertulis sebelumnya dari Penasihat Umum.

KESIMPULAN:

Pedoman ini tidak dimaksudkan untuk mencakup setiap dan segala situasi yang mungkin memicu pertanyaan mengenai FCPA, UKBA atau undang-undang anti-penyuapan atau anti-korupsi lainnya yang berlaku. Ini hanya mencakup beberapa pertanyaan yang lebih umum dan hanya membahas beberapa kontrol internal terkait anti-korupsi kami. Kami menekankan bahwa setiap karyawan wajib mematuhi hukum yang berlaku, menggunakan penilaian yang baik dan akal sehat dalam aktivitas bisnis mereka, dan dalam semua kasus, mematuhi prinsip-prinsip dasar kejujuran, integritas, dan transaksi yang adil. Setiap kali ada karyawan yang ragu apakah tindakan yang diusulkan dapat melanggar FCPA atau undang-undang anti-penyuapan atau anti-korupsi lain yang berlaku, ia wajib berkonsultasi dengan Departemen Hukum atau Departemen Etika dan Kepatuhan untuk memastikan bahwa tindakan yang diusulkan tidak akan melanggar hukum negara mana pun.

REFERENSI:

Kode Etik Perilaku Bisnis B&W Kebijakan Etika & Kepatuhan B&W

Kode Etik Direktur Utama dan Pejabat Keuangan Senior